

Judul : Perbaikan UU menjadi kunci
Tanggal : Kamis, 24 November 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 12

Perbaikan UU Menjadi Kunci

Daya tarik investasi hulu migas Indonesia tidak lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Salah satu ganjalan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia adalah masalah kesucian kontrak.

BADUNG, KOMPAS — Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi salah satu kunci penting memperbaiki investasi hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Perbaikan investasi diharapkan dapat mendorong produksi minyak Indonesia yang terus merosot dalam beberapa tahun terakhir. Komisi VII DPR menargetkan tahun depan proses revisi bisa tuntas.

Perbaikan iklim investasi hulu migas tersebut menjadi perbincangan hangat dalam acara "3rd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2022" yang diselenggarakan Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rabu (23/11/2022), di Badung, Bali. Selain dihadiri unsur pemerintah, acara tersebut juga dihadiri pelaku usaha industri hulu migas Indonesia.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, investor hulu migas membutuhkan kepastian hukum untuk berani berinvestasi di Indonesia. Penyelesaian revisi UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang tak kunjung tuntas sedang dinanti-nantikan. Penuntasan revisi bakal berpengaruh terhadap aktivitas produksi minyak dan gas bumi.

"Selain memberi fleksibilitas skema bagi hasil kepada investor, yaitu bebas memilih antara *cost recovery* (biaya operasi yang dipulihkan) dan *gross split* (skema bagi hasil berdasarkan produksi bruto), penuntasan revisi UU

Migas, kendati tidak mudah, juga diharapkan memberi daya tarik investor hulu migas berinvestasi di Indonesia," ujar Dwi.

Di acara yang sama, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengatakan, daya tarik investasi hulu migas Indonesia tidak lebih baik dibanding negara-negara lain, seperti Malaysia untuk kawasan Asia Tenggara. Salah satu ganjalan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia adalah masalah kesucian kontrak. Investor menginginkan ada kepastian hukum sehingga tidak mudah mengubah aturan atau kontrak yang sudah disepakati sebelumnya.

"Salah satu aspek non-teknis perbaikan investasi hulu migas Indonesia adalah mendorong penuntasan revisi UU Migas mulai tahun depan. Yang diinginkan adalah adanya kesucian kontrak. Kementerian ESDM sudah menyiapkan poin-poin penting untuk direvisi dalam UU tersebut. Ada saatnya nanti akan kami sampaikan ke DPR," kata Tutuka.

Selain perbaikan UU Migas, menurut Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto, penyederhanaan perizinan juga penting. Saat ini, jumlah perizinan industri hulu migas yang harus diurus kontraktor kontrak kerja sama hulu migas 146 izin yang tersebar di berbagai kementerian dan instansi. Dari jumlah itu, 16 izin harus diurus ke Kementerian ESDM.

"Penyederhanaan perizin-

an, kepastian regulasi, serta insentif fiskal dan non-fiskal adalah bagian penting untuk perbaikan tata kelola hulu migas Indonesia. Begitu pula penuntasan revisi UU Migas sangat mendesak. Saya menargetkan, revisi UU Migas bisa tuntas pada 2023," ujar Sugeng.

Tantangan produksi

Pada 2030, Indonesia menargetkan produksi minyak 1 juta barel per hari dan produksi gas 12 miliar standar kaki kubik per hari. Padahal, dalam lima tahun terakhir, produksi minyak Indonesia terus menurun. Realisasi produksi pada 2021 adalah 660.000 barel per hari, sementara realisasi produksi sampai 21 November 2022 adalah 618.329 barel per hari. Realisasi tersebut masih di bawah target 703.000 barel per hari di tahun ini.

Untuk meningkatkan produksi, menurut Dwi Soetjipto, SKK Migas telah merencanakan penambahan pengeboran sumur pengembangan. Pada 2020, pengeboran sumur pengembangan 240 sumur dan naik menjadi 480 sumur pada 2021. Tahun ini akan ada 800 pengeboran sumur pengembangan yang ditargetkan tuntas. Sementara tahun depan, jumlahnya dinaikkan menjadi 1.050 sumur.

"Selain itu, penerapan metode pengurusan minyak tingkat lanjut (*enhanced oil recovery/EOR*) juga diharapkan dapat menaikkan produksi minyak, khususnya di lapangan-lapangan minyak yang sudah tua," kata Dwi. GPO